

^{1,2}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Semarang
Jl. Soekarno Hatta Tlogosari
Semarang, Indonesia, 50196

³Corresponding author
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Semarang
Jl. Soekarno Hatta Tlogosari
Semarang, Indonesia, 50196
E-mail: aprihsantoso@usm.ac.id

Article info:

Received 5 December 2019

Accepted 6 December 2019

Available online 6 December 2019

Keywords: government; accounting;
monitoring; quality of local; human
resource competency

JEL Classification: H83, M41, M42, M48

DOI: <http://doi.org/10.32400/iaj.26622>



Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Silvia Almar'atus Sholohah¹

Ardiani Ika Sulistyawati²

Aprih Santoso³

Abstract

The purpose of this study is to analyze the influence of implementation Good Government Governance, Government Accounting Standards, Monitoring, Quality of Local Government Reform, Human Resource Competency, and Financial Accounting System on the Quality of Financial Statements in DPKAD Semarang City. The object in this study is SKPD staff in DPKAD Semarang City. This study uses primary data obtained by spreading the questionnaire. Sampling was done by using purposive sampling method and the sample size was 49 respondents. The data analysis was done by using multiple regression with the help of SPSS V20 software. The independent variables in this study consisted of Good Government Governance, Government Accounting Standards, Monitoring, Quality of Local Government Reform, Human Resource Competency, dan Financial Accounting System which the dependent variable is The Quality of The Financial Statements. The results of this study show that implementation of Monitoring to influence the quality of Financial Statements. But implementation of Good Good Government Governance, Government Accounting Standards, Quality of Local Government Reform, Human Resource Competency, dan Financial Accounting System have not influence the Quality of Financial Statements.

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Sebagian besar di wilayah Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Hal tersebut karena beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah (Zeyn, 2011). Pelaporan keuangan merupakan media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Oleh sebab itu, laporan keuangan pemerintah harus

menyajikan informasi sesuai pedoman yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan pernyataan menolak memberi opini. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014 perkembangan opini atas 524 LKPD Tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya (2012) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 88 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 23 LKPD, dari WDP menjadi WTP sebanyak 55 LKPD, dan dari TMP menjadi WDP sebanyak 10 LKPD. Secara keseluruhan, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 120 LKPD menjadi 156 LKPD atau naik sebesar 6,87 persen. Namun, terdapat juga peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dari 6 LKPD menjadi 11 LKPD atau sebesar 0,95 persen. (www.bpk.go.id).

Berdasarkan fakta tersebut kenaikan opini LKPD dari WDP menjadi WTP

karena beberapa entitas sudah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya (2012), namun atas LKPD yang belum memperoleh opini WTP (masih WDP dan TMP) BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sebagai berikut:

1. Penatausahaan persediaan dimana dalam penyajiannya tidak didukung kartu persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan.
2. Penatausahaan dan pengelolaan asset tetap karena nilai yang disajikan dalam neraca belum didukung pencatan dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan.
3. Penatausahaan kas, dimana kas tidak disajikan sesuai definisi kas menurut SAP.
4. Penatausahaan piutang pajak dan retribusi tidak didukung dengan dokumen data wajib pajak dan wajib retribusi dan belum menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
5. Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh Ketua BPK bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikutsertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah saja. Yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk membuat laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah, apakah penerapan *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tinjauan pustaka

Good government governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang efisien, sistem

pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Beberapa pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good* adalah:

1. **Partisipasi** adalah prinsip yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan. yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keberadaan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam reformasi tata pemerintahan (Darma, et. al., 2012). Partisipasi masyarakat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: (a) partisipasi masyarakat muncul karena ketidakmampuan pemerintah; dan (b) partisipasi murni swadaya masyarakat dikarenakan masyarakat membutuhkan sesuatu.
2. **Transparansi (*transparency*)** adalah keterbukaan proses perumusan kebijakan publik bagi masyarakat (terbuka bagi partisipasi masyarakat). Semua urusan pemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik (Darmanto dan Fadilah, 2010). Transparansi juga didefinisikan sebagai keterbukaan (*openness*) adalah tersedianya data/informasi bagi masyarakat yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik.
3. **Akuntabilitas publik** adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi yang bersangkutan (Armando, 2013). Rasa tanggung jawab merupakan syarat mutlak untuk penerapan *good governance*, karena sebagaimana menurut Alhadist, bahwa

“*setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban*”. Pertanggungjawaban dilaporkan bukan hanya kepada publik, akan tetapi dilaporkan juga kepada Tuhan Yang Mahaesa.

4. **Efektif/tepat sasaran, serta efisien/hemat.** Pemerintah diupayakan untuk melakukan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat.
5. **Kepastian Hukum**, dimana peradilan hukum harus independen dari intervensi, anti suap dan tidak dapat dijual beli dengan segelintir uang.
6. **Responsif** yaitu tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.
7. **Konsensus (Mufakat)** dimana Negara musyawarah bukan negara Kerajaan.
8. **Setara dan Inklusif**, dimana semua warga masyarakat mempunyai kesempatan, perlakuan, dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila *good government governance* sudah tercapai dalam suatu organisasi pemerintahan maka akan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai aturan yang berlaku. Hasil penelitian Maramis, et. al. (2018) menyatakan bahwa penerapan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Penerapan Good Government Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Penerapan standar akuntansi dilingkungan pemerintah sangatlah penting, sebagai salah satu kunci transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan oleh sektor pemerintah itu sendiri. Fungsi Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai sebuah acuan keseragaman yang dipakai bersama secara nasional dalam akuntansi pemerintahan, akan semakin memudahkan pemahaman berbagai unit kerja pemerintahan dalam mengakuntansikan laporan keuangan serta menghindari interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan salah penafsiran akan akuntansi pemerintahan itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,

misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Penerapan SAP menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. SAP merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008), dan Adhi dan Suharjo (2013), menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H2: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar pada perencanaan untuk merancang sistem upaya balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin keuangan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan

efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga pengawasan internal, juga dilakukan secara eksternal oleh lembaga pengawasab eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang sudah dalam pengawasan tentu tidak akan ada kekurangan didalamnya. Melalui persyaratan penyusunan sistem akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan diperiksa oleh aparat pengawas eksternal dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Anggaraeni, et. al. (2015) dan Nazar (2013) menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H3: Penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas kerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Kualitas kerja Aparatur pemerintah pada dasarnya merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu : (1) kemampuan, perangai, minat; (2) kejelasan dan penerimaan; serta (3) tingkat motivasi.

Kinerja seorang aparatur pemerintah dapat dilihat dari kemampuan, tingkat motivasi yang tinggi, bekerja keras, selalu melibatkan diri dalam mengatasi persoalan untuk memberikan solusi yang cemerlang atas segala bentuk kegiatan. Dengan kemampuan yang dimiliki, kualitas kerja aparatur dapat terlihat dari ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan pekerjaan. Pada organisasi di sektor publik, pengukuran kinerja menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas publik.

Hasil kerjanya harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja.

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berkompeten di bidang akuntansi mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP membutuhkan kompetensi PNSD agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang *useful*. Hasil penelitian Adhi dan Suharjo (2013) menemukan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H4: Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncul istilah baru di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai *liability* (beban atau *cost*).

Kompetensi SDM sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Keberhasilan suatu entitas dipengaruhi oleh kompetensi SDM yang dimiliki untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Maka, jika kompetensi SDM dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hasil penelitian dari Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan atas kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, hasil penelitian Solikin dan Kustiawan (2012), dan Agung dan Gayatri (2018) menunjukkan bahwa

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu andal, tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi.

Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi, dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Hasil penelitian Yuliani et. al. (2010), dan Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. **Relevan.** Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu :

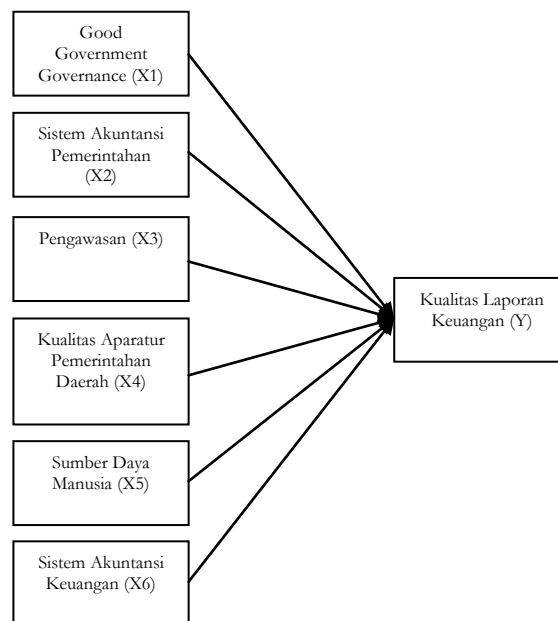
- a. Memiliki umpan balik (*feedback value*), dimana informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), dimana informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dimasa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, dalam arti informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, atau informasi laporan keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi tiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. **Andal.** Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi andal memenuhi karakteristik:

- a. *Penyajian jujur.* Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. *Dapat diverifikasi.* Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang berbeda jauh.
 - c. *Netralitas.* Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.
3. **Dapat dibandingkan.** Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. **Dapat dipahami.** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Gambar 1 menyajikan kerangka pemikiran atas penelitian ini berdasarkan pada hipotesis yang dibangun.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Metode penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Kota Semarang. Sampel diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bendahara SKPD, staf akuntansi/pembukuan keuangan SKPD, kepala sub bagian keuangan SKPD, serta staf lain yang diidentifikasi terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 55 responden mengacu pada metode *purposive sampling* dan kuesioner yang dikembalikan untuk diolah adalah sebanyak 49 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

- α : Konstanta
 Y : Kualitas laporan keuangan
 X_1 : Penerapan *Good Government Governance*
 X_2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
 X_3 : Penerapan Pengawasan
 X_4 : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah
 X_5 : Kompetensi Sumber Daya Manusia
 X_6 : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi
 ϵ : Error

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji Kolmogorov Smirnov mempunyai hasil nilai sebesar 0,096 yang memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *residual error* atas data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 1. Uji Normalitas–Kolmogorov Smirnov

N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	0.30644315
	Absolute	0.176
Most extreme Difference	Positive	0.134
	Negative	-0.176
Kolmogorv-Smirnov Z		1.233
Asymp. Sig. (2 tailed)		0.096

^aTest distribution is normal

^bCalculated from data

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan sebagai prediktor model regresi memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 2. Pengujian multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
GGG	0.360	2.775
SAP	0.909	1.100
1 Pengawasan	0.333	3.003
Aparatur	0.164	6.083
SDM	0.935	1.070
SAK	0.121	8.297

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dari model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, karena signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 5%. Adapun rincian hasil uji adalah sebagai berikut: Sig. Good Government Governance = (0,90>0,05); Sig. SAP = (0,542>0,05); Sig. Pengawasan = (0,135>0,05); Sig. Kualitas Aparatur =

(0,216>0,05); Sig.Kompetensi SDM = (0,906>0,05); dan Sig.Pemahaman SAK = (0,396>0,05).

Tabel 3. Pengujian heteroskedastisitas – Uji Park

Model	Unstandard. Coef.		Standard. Coef.		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
Constant	6.486	31.559			0.206	0.838
GGG	9.608	5.536	0.411		1.736	0.090
SAP	-3.665	5.960	-0.092		-0.615	0.542
Pengawasan	14.453	9.483	0.375		1.524	0.135
Aparatur	-12.970	10.333	-0.440		-1.255	0.216
SDM	-0.385	3.236	-0.017		-0.119	0.906
SAK	-10.360	12.087	-0.351		-0.857	0.396

Dependent variable: Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 4 menunjukkan model persamaan regresi dari penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = -100.141 - 0.324X_1 + 0.883X_2 + 36.504X_3 + 1.711X_4 - 0.499X_5 - 0.356X_6$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Koefisien regresi variabel X1 (Penerapan *Good Government Governance*) menunjukkan bahwa peningkatan variabel Penerapan *Good Government Governance* dapat menurunkan variabel Kualitas Laporan Keuangan.
- Koefisien regresi variabel X2 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) menunjukkan bahwa peningkatan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat meningkatkan variabel Kualitas Laporan Keuangan.
- Koefisien regresi variabel X3 (Penerapan Pengawasan) menunjukkan bahwa peningkatan variabel Penerapan Pengawasan dapat meningkatkan variabel Kualitas Laporan Keuangan.
- Koefisien regresi variabel X4 (Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah) menunjukkan bahwa peningkatan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dapat meningkatkan variabel Kualitas Laporan Keuangan.
- Koefisien regresi variabel X5 (Kompetensi Sumber Daya Manusia) menunjukkan bahwa peningkatan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat menurunkan variabel Kualitas Laporan Keuangan.

f. Koefisien regresi variabel X6 (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan) menunjukkan bahwa peningkatan variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dapat menurunkan variabel Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 4. Hasil analisis regresi linear berganda

Model	Unstandard. Coef.		Standard. Coef.		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
Constant	-100.141	3.442			-29.095	0.000
GGG	-0.324	0.604	-0.014		-0.537	0.594
SAP	0.883	0.650	0.023		1.358	0.182
Pengawasan	36.504	1.034	0.970		35.295	0.000
Aparatur	1.711	1.127	0.059		1.518	0.136
SDM	-0.499	0.353	-0.023		-1.415	0.165
SAK	-0.356	1.318	-0.012		-0.270	0.788

Dependent variable: Kualitas Laporan Keuangan

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $656,077 > 2,32$ sehingga H_0 ditolak. Adapun signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini dimana penggunaan variabel bebas Penerapan *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 5. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	422.472	6	70.412	656.077	0.000
Residual	4.508	42	0.107		
Total	426.980	48			

Tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R. Square adalah 0,988. Hal ini berarti 98,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independen yaitu Penerapan *Good Government Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan sedangkan sisanya sebesar 1,2% ($100\% - 98,8\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Tabel 6. Koefisien korelasi dan determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.995	0.989	0.988	0.328

Pembahasan

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat dijelaskan pengaruh secara parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut.

Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengujian secara parsial didapatkan angka t_{hitung} antara Penerapan *Good Government Governance* (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $-0,537 < t_{tabel} = 2,0181$ dan angka probabilitas sebesar $0,594 > 0,05$; sehingga secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Penerapan *Good Government Governance* terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa penerapan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **ditolak**. Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan daerah agar publik dapat mengetahui kinerja yang telah dicapai dan wujud tanggungjawab atas penggunaan dana publik, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengetahui terkait kinerja pemerintah dan hanya menuntut mengenai kebenarannya saja. Hal ini dirasa masih belum optimal dalam penyampaian informasi ke masyarakat. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Maramis, et al. (2018) yang menyatakan bahwa Penerapan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengujian secara parsial didapatkan angka t_{hitung} antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $1,358 < t_{tabel} = 2,0181$ dan angka probabilitas sebesar

0,182 > 0,05; sehingga secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **ditolak**. Saat ini pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, namun kurangnya kesiapan dari Pemerintah Daerah mengenai peraturan baru tersebut, mengakibatkan Pemerintah masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 dimana pendapatan dan asset masih menggunakan basis kas. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil dari Nugraheni dan Subaweh (2008), Adhi dan Suharjo (2013) dan Anggaraeni, et al. (2015) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengujian secara parsial didapatkan angka t_{hitung} antara Penerapan Pengawasan (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $35,295 > t_{tabel} = 2,0181$ dan angka probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$; sehingga secara parsial terdapat pengaruh antara variabel Penerapan Pengawasan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **diterima**. Hal ini berarti bahwa kegiatan pengawasan internal pada DPKAD Kota Semarang telah menjamin bahwa semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah memberikan keyakinan memadai dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Anggaraeni, et al. (2015) dan Nazar (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah,

Pengaruh Penerapan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengujian secara parsial didapatkan angka t_{hitung} antara Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X_4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $1,518 < t_{tabel} = 2,0181$ dan angka probabilitas sebesar $0,136 > 0,05$; sehingga secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis keempat menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **ditolak**. Kurangnya pemahaman oleh PNSD dalam hal pembuatan laporan keuangan yang membuat laporan keuangan belum sesuai kualitas yang diinginkan. Aparatur pemerintah yang baik mampu memahami dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi (keuangan), dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Semarang agar mampu menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas. Para aparatur juga harus mempunyai keinginan untuk meningkatkan wawasan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Adhi dan Suharjo (2013) yang menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengujian secara parsial didapatkan angka t_{hitung} antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_5) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $-1,415 < t_{tabel} = 2,0181$ dan angka probabilitas sebesar $0,165 > 0,05$; sehingga secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis keempat menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **ditolak**. Hal ini disebabkan

karena kondisi kompetensi sumber daya manusia yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai bagian akuntansi/keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Dari sisi kuantitas, masih sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk penyelenggaraan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Kebanyakan dari pegawai yang ada masih pegawai baru tanpa pengalaman sebelumnya sehingga akan membutuhkan waktu lama dalam pemahamannya. Sebaliknya pegawai yang mempunyai masa kerja lebih lama lebih memahami tugas dan tanggungjawabnya namun mereka harus menambah pengetahuan mereka lagi apabila ada peraturan baru yang digunakan. Dalam pemerintah daerah juga tidak dilakukan rotasi atau perputaran posisi kerja, padahal hal itu sangat diperlukan untuk dapat menempatkan pegawai sesuai bidangnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Yuliani dan Agustini (2016) akan tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian dari Solikin dan Kustiawan (2012), dan Agung dan Gayatri (2018).

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka t_{hitung} antara Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X_6) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $-0,270 < t_{tabel} = 2,0181$ dan angka probabilitas sebesar $0,788 > 0,05$; sehingga secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hipotesis keenam menyatakan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **ditolak**. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah yang digunakan adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data,

pembukuan, dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. Dalam implementasi pengelola keuangan daerah diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian keuangan dan asset daerah. Selain itu, pemahaman SAK belum sepenuhnya mampu memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan dengan cara melakukan pencatatan secara kronologis pada semua transaksi, sehingga masih perlu banyak peningkatan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Yuliani et al. (2010), dan Yuliani dan Agustini (2016) yang menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kesimpulan

1. Hipotesis yang menyatakan Penerapan *Good Government Governance*, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **ditolak**.
2. Hipotesis menyatakan bahwa penerapan Pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah DPKAD Kota Semarang, **diterima**. Berdasarkan hasil pembahasan, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Semarang perlu memperhatikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan, baik dalam memahami dalam penggunaannya atau mengetahui pula Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pentingnya sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja lebih baik dengan adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang telah diterapkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Daftar pustaka

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Ekonomi STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
<http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/79>
- Agung, T., & Gayatri. (2018). Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1253-1276.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i02.p17>
- Anggaraeni, M., Purnamawati, I. G. A., & Atmadja, A. T. (2015). Pengaruh pengawasan keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan komitmen manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Badung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 3(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5244>
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/80>
- Darma, Jufri, & Hasibuan, A. F. (2012). Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. *Jurnal Mediasi*, 4(1), 49-58. <http://digilib.unimed.ac.id/411/1/Fulltext.pdf>
- Darmanto, & Fadilah, S. (2010). Kinerja aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 192-203.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIA/NA/article/view/1069>
- Maramis, M. M, Morasa J., & Wokas, H. R. N. (2018). Pengaruh penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 563-570. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20685.2018>
- Nazar. (2013). Pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah dan pengawasan internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 1(2), 124-131. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4174>
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1), 48-58. <http://dx.doi.org/10.35760/eb.2008.v13i1.321>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Solikin, I., & Kustiawan, M. (2015). Meningkatkan kualitas informasi akuntansi melalui pemberdayaan aparatur pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. *Majalah Ilmiah Unikom*, 13(1), 1-27. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=3931919930761147980
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Riset Akuntansi*, 3(2), 206-220. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/340>
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/124>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-37. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/497>